
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN DI DESA BALEDONO KECAMATAN TOSARI KABUPATEN
PASURUAN**

**Maria Magdalena Letek¹⁾ Roro Merry Chornelia Wulandari S.Pd.,M.AP²⁾,
Dekki Umamur Rais, S.Sos.,M.Soc.Sc³⁾**

Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang, Indonesia

Email : merry.chornelia@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengevaluasi bagaimana kebijakan pemerintah desa diimplementasikan di Desa Baledono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, untuk mencapai ketahanan pangan. Komponen kunci pembangunan desa adalah ketahanan pangan, yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang di masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, bergizi, dan dengan harga yang wajar. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan. Observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Masyarakat Desa Baledono, organisasi tani, anggota BUMDes, dan pengurus desa merupakan informan penelitian. Temuan menunjukkan bahwa pengembangan lahan pertanian, pengembangan infrastruktur irigasi, bantuan benih dan pupuk, dan penguatan kelompok tani merupakan beberapa inisiatif utama yang digunakan di Desa Baledono untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat implementasinya, termasuk sedikitnya sumber daya manusia, pasokan air yang tidak menentu, dan perubahan pola cuaca yang berdampak pada produksi pertanian.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Desa, Ketahanan Pangan, Desa Baledono.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and evaluate how village government policies are implemented in Baledono Village, Tosari District, Pasuruan Regency, to achieve food security. A key component of village development is food security, which aims to ensure that everyone in the community has access to sufficient, safe, nutritious food at a reasonable price. A qualitative descriptive approach was used as the research methodology. Direct observation, in-depth interviews, and documentation studies were used to collect data. The Baledono Village community, farmer organizations, Village-Owned Enterprise (BUMDes) members, and village administrators served as informants for the study. The findings indicate that agricultural land development, irrigation infrastructure development, seed and fertilizer assistance, and farmer group strengthening are some of the main initiatives used in Baledono Village to implement food security policies. However, several challenges still hamper their implementation, including limited human resources, uncertain water supplies, and changing weather patterns that impact agricultural production.

Keywords: Policy Implementation, Village Government, Food Security, Baledono Village

PENDAHULUAN

Karena pangan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah, maka pangan merupakan komoditas strategis yang sangat penting bagi negara Indonesia. Masyarakat turut serta dalam produksi, pasokan, perdagangan, dan distribusi pangan serta memiliki hak atas pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, dan dengan harga yang wajar, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, mempromosikan, mengelola, dan mengawasi industri pangan. Pangan merupakan hak asasi manusia, Indonesia berkomitmen untuk menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi seluruh warganya. Berbagai inisiatif sedang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan guna mencapai ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan (Widowati, 2019). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kedaulatan dan kemandirian pangan nasional. Selain memastikan pasokan pangan, ketahanan pangan nasional juga mencakup peningkatan daya saing produk pangan lokal serta kemandirian dan kedaulatan. Ketersediaan dan harga pangan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, menjadikannya komoditas yang sangat penting. Gangguan dalam industri pangan dapat berdampak luas pada kondisi sosial dan kepercayaan publik, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman dari sejumlah krisis (Miyasto, 2020).

Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di semua tingkatan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sering disebut sebagai ketahanan pangan. Pangan harus mudah tersedia bagi semua orang, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, dan merata. Tujuan utamanya adalah membangun masyarakat berkelanjutan yang aktif, sehat, dan produktif (Badan Pangan Nasional, 2023). Ketahanan pangan merupakan masalah strategis yang semakin kompleks di seluruh dunia karena sejumlah variabel, termasuk kondisi ekonomi, peningkatan populasi, kemiskinan, dan perubahan iklim. Akibatnya, sektor pertanian sangat penting untuk menjaga pasokan pangan di tingkat nasional dan internasional (Hudaya dkk., 2023). Kebutuhan akan diversifikasi konsumsi pangan juga ditekankan oleh ketahanan pangan. Mendorong penggunaan beragam sumber pangan regional, seperti sumber karbohidrat selain beras dan gandum, diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan pokok. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat merupakan dua tujuan utama diversifikasi ini (Simatupang dkk., 2023).

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini berupa kata dan frasa, bukan nilai numerik yang diperoleh dari perhitungan statistik, metodologi yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan teknik deskriptif, kondisi barang yang diteliti dijelaskan dengan menyoroti elemen-elemen kunci yang mendukung objek penelitian. Agar peneliti dapat melaporkan jenis penelitiannya, penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang kemudian akan memberikan gambaran umum dan penjelasan yang dianalisis secara menyeluruh oleh peneliti. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan karena akan memberikan data berupa kata dan frasa, bukan angka atau perhitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara Komunikasi Pemerintah Desa Baledono Dalam Menyampaikan Kebijakan Dan Program Ketahanan Pangan Kepada Masyarakat.

Sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang konkret dan berkelanjutan di tingkat lokal, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat tentang kebijakan dan inisiatif ketahanan pangan sangat penting. Memastikan pemahaman dan keselarasan merupakan komponen penting. Masyarakat dijamin memahami isi kebijakan, manfaat program, dan cara mereka dapat berpartisipasi atau memperoleh manfaat darinya jika ada komunikasi yang jelas. Hal ini menghilangkan kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan.

2. Ketersediaan Sumber Daya (Anggota, Sdm, Sarana Dan Prasarana) Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Desa Baledono

Implementasi tidak akan berhasil jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan, meskipun isinya telah disajikan dengan jelas dan konsisten. Sumber daya manusia, seperti keahlian, implementasi, dan sumber daya keuangan, adalah contoh dari sumber daya tersebut (George C. Edward III). Aparat desa menawarkan sejumlah kemampuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk traktor mini, alat penyemprot pestisida, peralatan panen, dan alat pengolahan pangan seperti mesin penggiling padi. Kami juga ingin mendatangkan mesin pembuat tepung lokal. Benih dan bibit unggul disediakan oleh aparat desa untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pemerintah desa juga menyediakan pupuk dan pestisida organik, yang diperlukan untuk praktik pertanian berkelanjutan. Jalan pertanian juga sangat penting karena memudahkan pengangkutan hasil panen dan peralatan pertanian. Dedikasi aparat desa dalam mempraktikkan kebijakan ketahanan pangan.

3. Komitmen Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Ketahanan Pangan

Disposisi mengacu pada kepribadian dan sifat pelaksana, seperti dedikasi, integritas, dan demokrasi. Pelaksana akan menjalankan kebijakan sesuai dengan maksud pembuat kebijakan jika mereka memiliki disposisi yang positif. Proses implementasi kebijakan juga akan tidak produktif jika pelaksana dan pembuat kebijakan memiliki sikap atau sudut pandang yang berbeda (George C. Edward III). Pemerintah desa telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan ketahanan pangan; berbagai kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan; 20% dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan, dan pemerintah desa juga memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan lokal dan menyediakan pangan pokok dengan harga yang wajar, pemerintah desa terlebih dahulu memberikan kontribusi dana untuk pembangunan jalan bagi program ketahanan pangan melalui partisipasi modal di BUMDes.

4. Struktur Organisasi Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Desa Baledono

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, yang dikenal sebagai struktur birokrasi, memiliki dampak besar pada bagaimana kebijakan diimplementasikan. Prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi merupakan komponen dari struktur organisasi. Menurut George C. Edward III, struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pemantauan dan menghasilkan birokrasi yang berbelit-belit, atau proses birokrasi yang rumit, yang mengurangi fleksibilitas aktivitas organisasi. Kepala desa bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi ketahanan pangan ini secara keseluruhan, terutama dalam hal pengambilan keputusan strategis, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan memastikan program berjalan dengan baik. Tentu saja, tim pengawas dan mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan ketahanan pangan membantu pekerjaan ini. Menurut pengamatan penulis, program ketahanan pangan di Desa Baledono dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi semuanya dilakukan secara kohesif dan terorganisir, dimulai dari penasihat umum yang bertindak sebagai kepala desa. Selain itu, seorang pengawas terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, ada seorang direktur yang mengawasi seluruh operasi kebijakan ketahanan pangan dan memainkan peran penting. Seorang sekretaris dan bendahara juga bertanggung jawab atas hal-hal lain.

5. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Program Ketahanan Pangan.

Pertama, di sini, desa selalu menyumbang 20% dari dana desa untuk kebijakan ketahanan pangan, yang merupakan salah satu faktor pendukung; tanpa dana, kebijakan tersebut tidak akan berfungsi. Kedua, partisipasi masyarakat sangat penting karena kebijakan ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan oleh satu pihak saja; tanpa masyarakat, kebijakan tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Ketiga, terdapat potensi sumber daya alam di sini; kita memiliki lahan pertanian, sumber daya air, dan komoditas lokal yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan produksi pangan. Saya percaya itu adalah beberapa faktor pendukung dalam kebijakan ketahanan pangan di sini.

PEMBAHASAN

1. Cara Komunikasi Pemerintah Desa Baledono Dalam Menyampaikan Kebijakan Dan Program Ketahanan Pangan Kepada Masyarakat.

Berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan dan program ketahanan pangan, pemerintah desa biasanya akan mengirimkan undangan untuk pertemuan yang diselenggarakan oleh pejabat desa. Pada pertemuan tersebut, kebijakan akan dikomunikasikan, seperti apa yang akan ditawarkan, dan pemerintah desa juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai isu-isu kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Di sinilah komunikasi antara

pemerintah desa dan masyarakat terjadi. Namun, karena tidak semua orang di masyarakat memiliki akses ke media sosial, dan beberapa bahkan tidak memiliki telepon seluler, maka pejabat desa tidak dapat berkomunikasi secara digital.

2. Ketersediaan Sumber Daya (Anggota, SDM, Sarana Dan Prasarana) Dalam Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Desa Baledono

Benih dan bibit unggul disediakan oleh aparat desa untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, pemerintah desa menyediakan pupuk dan pestisida organik, yang diperlukan untuk praktik pertanian berkelanjutan. Jalan pertanian juga disediakan karena sangat penting untuk transportasi alat pertanian dan hasil panen. Para peneliti memperhatikan infrastruktur dan fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah desa selama implementasi program kebijakan ketahanan pangan di Desa Baledono, tetapi mereka juga percaya bahwa infrastruktur dan fasilitas tersebut masih kurang dan belum membantu petani secara maksimal. Untuk memastikan petani selalu memiliki pasokan benih dan pupuk yang cukup, pemerintah juga menyediakan berbagai macam benih dan pupuk berkualitas tinggi.

3. Komitmen Aparatur Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Ketahanan Pangan di Desa Baledono

Pemerintah desa berkomitmen untuk melaksanakan strategi ketahanan pangan. Mengalokasikan 20% dari keuangan desa untuk program ketahanan pangan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien hanyalah dua dari janji-janji yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Melalui partisipasi ekuitas dalam BUMDes, yang bertujuan untuk menjamin pasokan pangan lokal dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dewan desa pertama-tama memberikan dana tunai untuk pembangunan jalan kepada program ketahanan pangan.

Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama secara erat untuk mengimplementasikan strategi ketahanan pangan ini. Pemerintah desa secara teratur menawarkan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mempertahankan kerja sama ini. Inisiatif-inisiatif ini meningkatkan swasembada pangan Desa Baledono dengan mendidik penduduk setempat tentang nilai ketahanan pangan dan bagaimana mengelola sumber daya lokal dengan lebih baik.

4. Struktur Organisasi Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan Di Desa Baledono

Program ketahanan pangan di Desa Baledono dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, namun dengan cara ini, semuanya dilakukan secara kompak dan terstruktur. Penasihat umum secara langsung menjadi tugas kepala desa, dan ada juga pengawas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, seorang direktur memainkan peran penting dalam mengawasi semua kegiatan kebijakan ketahanan pangan, dan sekretaris serta bendahara mengawasi hal-hal lainnya.

5. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Program Ketahanan Pangan Di Desa Baledono

Salah satu dari sekian banyak tantangan adalah kualitas sumber daya manusia yang buruk di desa Baledono. Banyak sumber daya manusia, khususnya petani, masih kurang memahami teknik perawatan dan penanaman yang lebih baik. Banyak petani terus mengoperasikan pertanian mereka menggunakan teknik kuno.

Cuaca yang tidak dapat diprediksi dapat memengaruhi tidak hanya sumber daya manusia tetapi juga tanaman yang ditanam atau ingin ditanam oleh petani. Tanaman terbaik harus dipilih dengan memantau cuaca secara cermat sebelum penanaman. Hal ini membuat petani lebih sulit untuk bertani. Hasil panen juga akan lebih rendah dari yang diperkirakan jika jenis tanaman tidak sesuai dengan cuaca.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan empat indikator utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi temuan studi menunjukkan bahwa upaya pemerintah desa untuk mencapai ketahanan pangan di Desa Baledono berjalan cukup baik. Dari segi komunikasi, administrasi desa masih bergantung pada interaksi tatap muka dengan masyarakat melalui diskusi atau pertemuan, yang dianggap efisien dalam menyebarkan informasi tetapi belum sepenuhnya didukung oleh teknologi digital. Dari segi indikator sumber daya, berbagai sumber daya tersedia, termasuk benih unggul, pupuk, peralatan pertanian, dan bantuan keuangan desa; namun demikian, penggunaannya belum dioptimalkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan petani. Pengelola desa menunjukkan dedikasi yang tinggi dari segi disposisi dengan mengalokasikan sekitar 20% dari pengeluaran desa dan melaksanakan pelatihan masyarakat. Sementara itu, implementasi program telah mengikuti pembagian kerja yang telah ditentukan dalam hal struktur birokrasi, memungkinkan kegiatan berjalan secara terorganisir; namun demikian, perbaikan masih diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Keberhasilan program ketahanan pangan jelas dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti ketersediaan dana desa yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, dan kelimpahan sumber daya alam seperti lahan pertanian dan ketersediaan air, menurut formulasi masalah yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat. Selain itu, bantuan berupa benih dan pupuk yang lebih baik membantu meningkatkan hasil pertanian. Namun demikian, pelaksanaannya terhambat oleh sejumlah masalah, termasuk infrastruktur pertanian yang tidak memadai, terutama fasilitas penyimpanan hasil panen dan sistem irigasi. Hambatan lain adalah kualitas sumber daya manusia yang digunakan dalam manajemen dan teknologi pertanian kontemporer yang rendah. Lebih lanjut, produksi pertanian lokal juga dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu.

Saran

Saran untuk pemerintah desa dalam menangani beberapa faktor penghambat yaitu

1. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan peningkatan mutu dan ketersediaan infrastruktur pertanian secara menyeluruh, terutama melalui pengelolaan dan perbaikan sistem irigasi agar distribusi air dapat berjalan secara merata dan efisien di seluruh area pertanian. Selain itu, penyediaan sarana pascapanen seperti gudang atau lumbung desa yang memadai menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas hasil produksi sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kerusakan hasil panen. Upaya tersebut juga perlu diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna mendukung pengembangan infrastruktur pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
2. Pemerintah desa perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan program pelatihan, penyuluhan, serta pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan fokus pada penerapan teknologi pertanian modern. Kegiatan tersebut dapat melibatkan tenaga ahli maupun penyuluh pertanian sebagai sarana transfer pengetahuan dan peningkatan kompetensi masyarakat dalam mengelola usaha tani. Di samping itu, diperlukan upaya untuk mendorong kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan inovasi di bidang pertanian, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian secara lebih optimal.
3. Pemerintah desa diharapkan mampu memperkuat langkah-langkah mitigasi terhadap dampak perubahan cuaca yang tidak menentu melalui berbagai upaya yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada petani mengenai penerapan pola tanam yang adaptif terhadap kondisi iklim, seperti penyesuaian waktu tanam dan pemilihan jenis komoditas yang sesuai dengan kondisi cuaca. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mendorong penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, baik terhadap kekeringan maupun curah hujan yang tinggi, sehingga risiko penurunan hasil panen dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. 2022 . *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit NEM . <https://books.google.com/> (Diakses 27 Oktober 2025)
- Badan Pangan Nasional. 2023. *Laporan Ketahanan Pangan dan Gizi 2023*. Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Diakses dari c(<https://www.bapanas.go.id> :Jakarta. Diakses 15-November 2025)
- Food and Agriculture Organization.** 2023. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. FAO – United Nations. Diakses dari (<https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc3017n>.(Diakse20 November 2025)
- Hadi, A. 2021. Desentralisasi dan Kemandirian Desa: Analisis Peran Pemerintah dalam Pembangunan Lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145–156. Diakses 20 Oktober,2025)

- Hudaya, A., dkk.** 2023. *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Global*. Universitas Gadjah Mada – Jurnal Ketahanan Nasional. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn> :Yogyakarta Diakses 21 Oktober 2025)
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia.** 2017. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2017 tentang Diversifikasi Pangan Pokok Lokal*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/86075> :Jakarta(Di Akses 21 Oktober,2025)
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. 2022. *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit NEM.(Di Akses 25 N0vember 2025)
- Miyasto, M.** 2020. *Strategi Ketahanan Pangan Nasional dan Stabilitas Ekonomi*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas). Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id> (Di Akses 20 Oktober 2025)
- Nurcholis, H. 2021. Pemerintahan Desa dan Dinamika Kebijakan Publik di Indonesia. **Jurnal Desentralisasi dan Otonomi Daerah**, 5(1), 44–56.(Di Akses 1 November 2025)
- Rahayu, F., & Putri, M. 2022. Implementasi Kebijakan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Otonomi Daerah*
- Rukayat, A. 2020. Desentralisasi dan Kemandirian Pemerintahan Desa di Indonesia. **Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik**
- Saliem, H. P.** 2020. *Ketahanan Pangan: Konsep dan Pengukuran*. Badan Urusan Logistik (BULOG). Diakses dari (<https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan> : Jakarta Di Akses 21 Oktober 2025)
- Simatupang, P., Suryana, A., & Nuraini, I.** 2023. *Transformasi Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian. Diakses dari (<http://dx.doi.org/10.21082/akp> :Bogor Di Akses 22 Oktober 2025)
- Soeikromo, Deasy. 2018. “Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*
- Tono, M., Ariani, M., & Suryana, A.** 2023. *Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian Global dan Nasional*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian. Diakses dari (<http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.1-20>: Bogor Di Akses 23 Oktober 2025)
- Valentina, A.** 2024. *Dashboard Visualization of Food Security in Indonesia 2018–2022*. *Indonesia Geospatial Journal*. Diakses dari (<https://igi.or.id/journa> : JakartaDi Akses 6 November 2025)
- Widowati, S.** 2000. *Identifikasi Bahan Makanan Alternatif dan Teknologi Pengolahannya*. Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan – Badan Litbang Pertanian. Diakses dari (<https://repository.pertanian.go.id/items/43e0a0a1-a6c5-4df3-9888-48b39e012096> :Bogor Di Akses 25 Oktober 2025)
- Pemerintah Republik Indonesia.** 2012. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38541> Di Akses22 Oktober 2025)

Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.* Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/54749> di akses 23 oktober 2025)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2017. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2017 tentang Diversifikasi Pangan Pokok Lokal.* Diakses dari (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/86075> :Jakarta,23, Oktober 2025)

Undang -undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.